



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara

NOMOR SOP	W.25.SDM.SDM.1.OT.02.02-738	
	TANGGAL PEMBUATAN	21 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	25 Maret 2024
	TANGGAL EFEKTIF	25 Maret 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
	 Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahju Prihandono NIP 197210081999031001	
SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	NAMA SOP	USULAN POSTUR ANGGARAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM;4. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengoprasian MS Office.2. Memahami proses penganggaran.3. Memiliki kemampuan analisis.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
-	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer yang dilengkapi <i>Microsoft office</i>2. Printer3. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat berakibat kinerja anggaran tahunan tidak akan berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN POSTUR ANGGARAN**

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Sekjen	Itjen	BPSDM	Kanwil Sulut	Kepala Badiklat / KPA	Kasi Program & Evaluasi	Pelaksana/JF	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan) menginstrusikan Penyusunan Postur Anggaran melalui BPSDM. Sekretaris BPSDM mengirimkan surat usulan postur anggaran ke satuan kerja	Mulai											
2	Kepala Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara menerima surat usulan postur anggaran dan mendisposisikan ke Kepala.Seksi Program dan Evaluasi												
3	Pembahasan usulan postur anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran Badiklat Hukum dan HAM Sulut												Rapat Internal
4	Menyusun usulan postur anggaran sesuai dengan formulir yang telah di tetapkan												
5	Setelah disetujui pejabat berwenang, usulan postur anggaran dikirim ke BPSDM												
6	Pembahasan Reviu Postur Anggaran bersama BPSDM serta Inspektorat Jenderal. Dalam pembahasan ini juga dilakukan penyempurnaan Postur Anggaran.												
7	Postur Anggaran disetujui dan dapat digunakan												

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Wahju Prihandono

NIP 197210081999031001